

SKPD Harus Punya Terobosan



<http://kemenperin.go.id/>

Muaradua

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta melakukan terobosan. “Sesuai visi misi kita, arah kebijakan strategis pembangunan sudah terarah, di antaranya 2017 pembangunan menuju OKUS yang bermartabat, religious, sejahtera, aman, dan adil”, ujar Bupati OKU, Popo Ali B Commerce, dalam musrenbang, kemarin.

Untuk mencapai itu, SKPD dituntut melaksanakan apa yang menjadi prioritas di masyarakat. “Yakni peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik¹ (*public service*),” ujar Popo.

SKPD harus bersinergi bersama agar sasaran dan target yang telah ditetapkan tercapai. “Hanya dengan bersama, kita bisa mencapai apa yang sudah kita canangkan bersama,” katanya.

Popo menyadari kondisi APBD saat ini tak akan mampu mencapai sasaran yang telah direncanakan. “Namun jika seluruh SKPD mulai dari paling bawah bisa bahu membahu, apa yang dicita-citakan masyarakat bisa dicapai,” urainya.

Popo meminta SKPD dalam menyusun kerangka program hendaknya bersinergi dengan DPRD. “Agar apa yang menjadi permasalahan masyarakat bisa sama-sama dituangkan dalam program prioritas pemerintah,” tukasnya.

Sumber Berita:

Sumatera Ekspres, Rabu, 23 Maret 2016 hal.24

¹ Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik)

Sedangkan dalam UU yang sama dijelaskan, yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.